LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

Tahun 2024

DPMPTSP

Kabupaten Nganjuk

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk
MPP Nyawiji Kab. Nganjuk Jalan Brantas Kelurahan Werungotok
Telp/Fax/ (0358) 3510097 Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id Website : dpmptsp.nganjukkab.go.id

LAMPIRAN DOKUMEN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karuniaNya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)/ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk dan dengan maksud untuk mengetahui kemajuan (progress) dan prestasi kerja (achievement) yang dapat dicapai oleh DPMPTSP pada Tahun 2024.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya saran dan masukan yang konstruktif guna peningkatan kualitas tugas-tugas Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Nganjuk dimasa yang akan datang. Berikutnya kepada semua pihak yang telah secara aktif berpartisipasi dan memberikan konstribusi dalam penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Nganjuk, Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN NGANJUK

PURWO BUJONO, S.Hut
NIP 19670912 199703 1 004

IKTISAR EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Yang memiliki tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan PTSP (DPMPTSP) yaitu mempunyai tugas : menyusun, melaksanakan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nganjuk dalam menjalankan fungsi tersebut selalu mengedepankan prinsip kebersamaan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektif dan responsif serta berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk tahun 2024, merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dan pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Nganjuk, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Tahun 2024 – 2026, Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Tahun 2024 dan Dokumen Penetapan Kinerja DPMPTSP.

Keberhasilan dalam Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut merupakan hasil kerja keras DPMPTSP Kabupaten Nganjuk dan instansi terkait serta peran serta masyarakat (pelaku Usaha). Secara umum dapat disampaikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 tidak mengalami kendala yang sangat berarti. Capaian kinerja Program, Kegiatan dan Keuangan oleh DPMPTSP selama tahun I Resnstra 2024 - 2026 menunjukan hasil yang cukup dilihat dari tingkat investasi dan kepuasan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan *good govermance* di lingkungan Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi, maka setiap kinerja penyelenggaraan Pemerintah, wajib menyusun laporan akuntabilitas.

Dasar Hukum penyusunan LKjIP yaitu:

1. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Kepala LAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Penyusunan Laporan Kinerja;
4. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maka LKjIP ini disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dengan memperhitungkan situasi kondisi, potensi, peluang, strategi dan kendala yang ada. LKjIP mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sehubungan hal tersebut diatas, maka implementasi/ pelaksanaan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan yang hendak dicapai berkaitan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati Nganjuk di bidang penanaman modal yaitu **Meningkatkan Produktifitas ekonomi local sektor investasi daerah**

Untuk itu pada tahun 2024 perlu dilakukan kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan dalam upaya meningkatkan investasi.

Adapun sasaran yang hendak dicapai berkaitan dengan program, kegiatan, dan sub Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nganjuk yaitu Meningkatnya Iklim Investasi yang kondusif dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung program di atas, maka diadakan kegiatan–kegiatan yang relevan dan sesuai sehingga dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya secara periodik.

LKjIP ini merupakan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai penjabaran visi, misi dan strategi Bupati Nganjuk yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan–kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan dalam mencapai sasaran program tahun 2024 termasuk dalam kriteria berhasil, karena strategi yang ditetapkan dalam mencapai sasaran hambatan dan kekurangan dapat di atasi.

Demikian Rencana Strategi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk diharapkan dapat memacu peningkatan kinerja dan peluang–peluang menuju peningkatan perbaikan yang terus dilakukan dan masih terbuka.

Sedangkan strategi yang merupakan kebijakan dalam mengimplementasikan program Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nganjuk didalam mewujudkan tujuan dan sasaran, yaitu:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Promosi Penanaman Modal;
4. Pelayanan Penanaman Modal;
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2024, Pemerintah menyusun LKjIP 2024 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi Pertanggungjawaban Kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin)/Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud dari disusunnya LKjIP DPMPTSP Kabupaten Nganjuk adalah untuk menyajikan Pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran.

B. Tujuan

Tujuan dari disusunnya LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 antara lain:

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk dengan pembanding hasil Pengukuran Kinerja dan Penetapan Kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nganjuk;
3. Bahan Evaluasi untuk Penyusunan Rencana Kegiatan dan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nganjuk pada tahun berikutnya.

1.3 GAMBARAN UMUM

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk yang dibentuk berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati No 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah serta Keputusan Bupati Nomor 188 / 120 / K / 411.013 / 2022

Terkait dengan gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

   Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu

2. Fungsi

   Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Nganjuk adalah :

   a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu ;
   b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu ;

c. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu ;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu ;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Susunan Organisasi

Dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk meliputi :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Substansi Keuangan
   c. Sub Substansi Perencanaan
3. Kelompok Substansi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, terdiri dari:
   a. Sub Substansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
   b. Sub Substansi Promosi Penanaman Modal.
4. Kelompok Substansi Pelayanan, Pengelolaan Data dan SIPM terdiri dari:
   a. Sub Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan PM ;
   b. Sub Substansi Pengelolaan Data dan SIPM.

C. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh DPMPTSP Kabupaten Nganjuk dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas berjumlah 17 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Pegawai menurut Golongan dan Jabatan adalah sebagai berikut:

U R A I A N	Satuan	Jumlah
a. Jumlah PNS		
1) Golongan I	Orang	-
2) Golongan II	Orang	2

3) Golongan III	Orang	10
4) Golongan IV	Orang	5
5) PPPK	Orang	1
Jumlah	Orang	17
b. Jumlah Pejabat Struktural		
1) Eselon II	Orang	1
2) Eselon III	Orang	1
3) Eselon IV	Orang	1
c. Jumlah Pejabat Fungsional	Orang	6
d. Jumlah Staf PNS	Orang	8
Jumlah	Orang	17

(Data per 10 Januari 2024)

b. Pegawai menurut pendidikan formal adalah sebagai berikut:

No	U R A I A N	Satuan	Jumlah
1	Lulusan SD	Orang	-
2	Lulusan SLTP	Orang	-
3	Lulusan SLTA	Orang	2
4	Lulusan D3	Orang	2
5	Lulusan Sarjana Muda/D3	Orang	-
6	Lulusan S-1	Orang	9
7	Lulusan Pasca Sarjana / S-2	Orang	4
8	Lulusan Pasca Sarjana / S-3	Orang	-
Jumlah		Orang	17

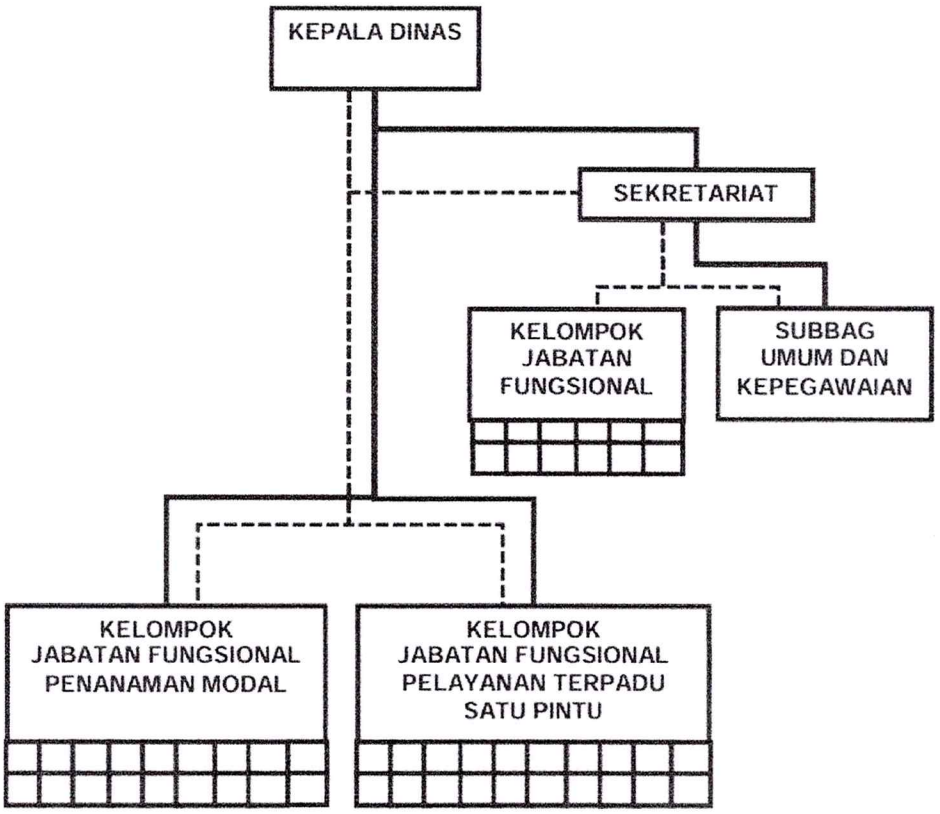
(Data per 10 Januari 2023)

D. Bagan Susunan Organisasi

Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP KABUPATEN NGANJUK

Gambar 1 SOTK Dinas Penanaman Modal dan PTSP



Keterangan :

_____ = Garis Komando

- - - - - - - - - - - - - - = Garis Koordinasi

E. Isu Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk di tahun 2024 adalah :

1. Belum optimalnya promosi investasi baik melalui pameran, media sosial, elektronik, dan papan informasi lainnya.
2. Sulitnya mencari lahan untuk investasi besar yang membutuhkan lahan luas;
3. Lokasi yang diminati investor sudah di tetapkan sebagai kawasan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dan kawasan LSD (Lahan Sawah Dilindung) sehingga tidak bisa alih fungsi lahan;
4. Belum tersedianya ruang yang representatif untuk menyajikan data dan potensi investasi
5. Pengembangan aplikasi perizinan teritegrasi secara elektronik yang belum disertai peningkatan kapasitas SDM,
6. Sarana Prasarana dan Anggaran yang memadahi;
7. System perizinan OSS RBA atau Online Single Submission Risk Based Approach merupakan system perizinan peralihan dari OSS 1.1 yang menyesuaikan dengan Undang-undang Cipta Kerja sehingga banyak penyesuaian yang harus dilakukan;
8. Peralihan perizinan bangunan dari IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke PBG (Persetujuan Gedung Bangunan) mengikuti peraturan yang baru sehingga membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai system PBG tersebut;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Sebagai implementasi ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Nganjuk telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 - 2026 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 3 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, kebijakan beserta program dan kegiatan yang mendukung pembangunan. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitaskinerjanya.

Sejalan dengan **visi** RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2024 – 2026 yakni **NGANJUK YANG MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA** dan misi yang sesuai dengan Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja DPMPTSP Kabupaten Nganjuk yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu yaitu **Misi** nomor **4 (empat) " Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur, adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam menkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil, memantapkan reformasi birokrasi menuju profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik**

, maka DPMPTSP Kabupaten Nganjuk memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja yang tentunya sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Nganjuk tersebut diatas sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal (Rp)	Target Akhir Periode Renstra (Rp)	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Capaian Tahun Awal (Rp)		
			2024	2026			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Lokal sektor Investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah	1.050.000.000.000	1.774.500.000.000	Meningkatnya Iklim Investasi	Presentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	26 %	29 %	31 %
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	3,6	4,1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,6	3,9	4,1

2.2 RINGKASAN / IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara pemberi amanah dengan penerima amanah selama satu tahun dengan kinerja yang terukur dan dapat dicapai, maka target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas out come disamping output dan harus ada saling keterkaitan dari tahun- tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiaptahunnya.

Tujuan dari disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan intregitas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerjaaparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dansanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerimaamanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, DPMPTSP Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dengan Bupati untuk mewujudkan Target Kinerja dimaksud sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	Meningkatnya Iklim Investasi	Presentase Pertumbuhan Nilai Investasi	26 %	
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Periinan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,6 (Baik)	

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan beberapa program kegiatan anatara lain 1 program penunjang dengan 5 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten

Nganjuk dan DAK dengan Anggaran Awal sebesar Rp. 8.406.190.450 dan setelah mengalami perubahan APBD menjadi sebesar Rp. 10.807.937.376

Program	Anggaran		Keterangan
	Awal	Setelah Perubahan	
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.326.149.450	9.698.976.376	APBD
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	431.500.000	419.800.000	APBD
3. Program Promosi Penanaman Modal	180.150.000	180.150.000	APBD
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	224.075.000	209.375.000	APBD
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	217.016.000	267.016.000	APBD & DAK
6. Program Pengelolaan data dan SIPM	25.300.000	32.620.000	APBD

Gambaran mengenai keterkaitan antar Tujuan/Sasaran, Indikator Kinerja, Program Anggaran yang mendukung sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	% Total Anggaran
1.	Meningkatnya Iklim Investasi	Presentase Pertumbuhan Nilai Investasi	1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Promosi Penanaman Modal 3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. 419.800.000 2. 180.150.000 3. 267.016.000	1. 3,88 % 2. 1,6 % 3. 2,47 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Periinan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	1. Pelayanan Penanaman Modal 2. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1. 209.375.000 2. 32.620.000	1. 1,93 % 2. 0,31%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya DPMPTSP Kabupaten Nganjuk perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja dinas selanjutnya. Hal itu sejalan dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang titik beratnya pada penilaian efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Untuk melaksanakan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerja Tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Nganjuk membuat Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024 - 2026

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah KabupatenNganjuk.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Pencapaian Target Tahun 2024

DPMPTSP Kabupaten Nganjuk telah menetapkan 2 sasaran yang ingin dicapai di tahun 2024 ini. Dari sasaran tersebut, dapat diketahui semua terpenuhi indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Pencapaian Indikator Kinerja 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun Tahun 2024	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan : Meningkatkan Produktifitas Ekonomi lokal sektor investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah	Rp. 1.050.000. 000.000	Rp. 1.359.191. 202. 844	100,77%
2	Sasaran: 1. Meningkatnya iklim investasi	Presentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	26 %	35.77%	137.58%
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	IPP	3,60	4,65	100,3 %

Berdasarkan tabel 3.1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa capaian pada indicator kinerja sasaran semua melampaui target dikarenakan :

1. Sasaran Meningkatnya Iklim Investasi

   DPMPTSP Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

   Nilai Realisasi Investasi pada tahun 2024 menunjukan peningkatan yang signifikan sebesar 35,77 % atau sebesar Rp. 1.359.191.202.844, capaian ini

merupakan formulasi dari Nilai Investasi yang tercatat pada LaporanKegiatan Penanaman Modal / LKPM Tahun 2024

Target Nilai realisasi Investasi Propinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 493.347.000.000, sementara Nilai realisasi investasi tahun 2024 perhitungan secara total di Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 1.359.191.202.844 atau mengalami peningkatan sebesar 137,58 % perhitungan persektor tahun 2024 kontribusi PMDN sebesar Rp. 1.234.600.619.802 dan PMA sebesar Rp. 65.327.558.965 serta UMK sebesar Rp. 59.263.024.077

Rekapitulasi Realisasi Investasi Daerah (LKPM) Tahun 2024

No	Target Realisasi	Realisasi Tribulan	PMA	PMDN	UMK	Jumlah
1	1.050.000.000.000	Tribulan I	2.736.001.089	363.145.200.000	0	365.881.201.089
		Tribulan II	17.479.151.838	280.108.509.253	6.502.916.788	304.090.577.879
		Tribulan III	2.357.370.831	168.503.096.806	0	170.860.467.637
		Tribulan IV	42.755.035.207	422.843.813.743	52.760.107.289	518.358.956.239
	Jumlah		65.327.558.965	1.234.600.619.802	59.263.024.077	1.359.191.202.844

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Sedangkan indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ,yaitu Indek Pelayanan Publik dapat melampaui target Indikator Indek Pelayanan Publik Sektor Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 dengan target 3,6 terealisasi 4,65 dengan capaian 100,3% dan kategori Sangat Baik. Dengan catatan bahwa hasil perhitungan Indek Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2024 merupakan Konversi dari Indek Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2024 , skala pada IPP adalah 0 – 5 sedangkan pada IKM 0 – 100, Tahun 2024 DPMPTSP berhasil memperoleh Nilai IKM sebesar 93,39. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan kepuasan masyarakat dengan pelayanan yang diterima di DPMPTSP pada tahun 2025.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2023 dan 2022

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun				Realisasi Tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Tujuan : Meningkatkan Produktifitas Ekonomi lokal sektor investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah	3.218.120 .000.000	3.318.210 .000.000	3.450.000 .000.000	1.050.000 .000.000	3.305.345 .722.393	4.529.076. 183.502	2.908.371 .628.507	1.359.191 .202.844
2	Sasaran: Meningkatnya iklim investasi	Presentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	3.218.120 .000.000	3.318.210 .000.000	3.450.000 .000.000	26 %	3.305.345 .722.393	4.529.076. 183.502	2.908.371 .628.507	35,77 %
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indek Pelayanan Publik (IPP)	87 (Baik)	87,5 (Baik)	88 (Baik)	3,6	83.5 (Baik)	86,05 (Baik)	88,63 (Baik)	4,65

Terdapat perbedaan Indikator kinerja pada Renstra tahun 2018 – 2023 dengan Renstra 2024 – 2026

Renstra 2018 - 2023		Renstra 2024 - 2026	
Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Tujuan : Meningkatnya Nilai Investasi Daerah dan Pelayanan prima di bidang perizinan dan non perizinan	Meningkatnya Iklim investasi	Tujuan : Meningkatkan Produktifitas Ekonomi lokal sektor investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah
Sasaran: Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Nilai Investasi Daerah	Sasaran: Meningkatnya iklim investasi	Presentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah
Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indek Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indek Pelayanan Publik (IPP)

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Pada Dokumen Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target Akhir pada dokumen Renstra yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DPMPTSP Kabupaten Nganjuk periode 2024- 2026 diuraikan Tabel berikut :

Tabel 3.1.3.1
Target Kinerja Renstra

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun		
		2024	2025	2026
Tujuan : Meningkatkan Produktifitas Ekonomi lokal sektor investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah	1.050.000 .000.000	1.356.000 .000.000	1.774.500 .000.000
Sasaran: Meningkatnya iklim investasi	Presentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	26 %	29 %	31 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indek Pelayanan Publik (IPP)	3,6	3.8	4,1

Tabel 3.1.3.2
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indicator kiberja	Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Pencapaian (%)
	Tujuan : Meningkatkan Produktifitas Ekonomi lokal sektor investasi Daerah	Nilai Investasi Daerah	1.774.500. 000.000	1.359.191. 202.844	76,6 %
	Sasaran: Meningkatnya iklim investasi	Presentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	31 %	35,77 %	115,4 %
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indek Pelayanan Publik (IPP)	4,1	4,65	113 %

Tabel 3.1.3.2 dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Nganjuk dalam rangka menunjang pencapaian sasaran kinerja di tahun 2024, dengan indikatornya adalah Presentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah dan Indek Pelayanan Publik (IPP). Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target di akhir tahun Renstra, capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten telah berada dalam kategori baik dikarenakan selalu ada peningkatan di setiap tahunnya. Meskipun demikian, peningkatan kinerja pelayanan harus terus ditingkatkan sehingga kepuasan masyarakat juga akan meningkat

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Dengan Standard Nasional

Tabel. 3.1.4
Perbandingan Target dan Realisasi Penanaman Modal Tahun 2024

No		Target	Realisasi	Prosentasi
1	Nasional	1.650.000.000.000.000	1.261.000.000.000.000	76,45 % (Data sd Tribulan III)
2	Provinsi Jatim	148.800.000.000.000	111.400.000.000.000	74,9 % (Data sd Tribulan III)
3	Kabupaten Nganjuk	1.050.000.000.000	1.359.191.202.844	129,45 % (Data sd Januari 2025)

Pada Tahun 2024 investasi secara nasional ditargetkan sebesar Rp. 1.650 Trilyun dan sampai dengan akhir Tribulan III sudah tercapai sebesar Rp. 1.261 Trilyun atau 76,45 % sedangkan Propinsi Jawa Timur ditargetkan sebesar Rp. 148,8 Trilyun dengan capaian sampai dengan Tribulan III mencapai Rp. 111.4 Trilyun atau 74,9 %

Kabupaten Nganjuk sendiri sebenarnya pada tahun 2024 oleh propinsi Jawa Timur dibebani Target Realisasi Investasi sebesar Rp. 493,347 Trilyun tetapi DPMPTSP kabupaten Nganjuk menetapkan Target sebesar Rp. 1,050 Trilyun dan tercapai sebesar Rp. 1.359.191.202.844 atau 137,58 % menunjukan hasil yang sangat baik atau bernilai kinerja Sangat Tinggi / Tinggi. Capaian ini ini merupakan formulasi dari nilai investasi yang tercatat pada Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal / LKPM.

Data Realisasi investasi adalah data diluar sektor Hulu Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi. Peningkatan Realisasi Investasi pada Tahun 2024 mampu melebihi dari capaian 2023 (berdasarkan Laporan LKPM)

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja

A. Sasaran Meningkatnya Iklim Investasi

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah kewajiban bagi setiap pelaku usaha sebagaimana tertuang dalam Perka BKPM No 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Berdasarkan Perka BKPM tersebut pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan menyampaikan kepada BKPM. Pelaporan LKPM dapat dipenuhi oleh pelaku usaha secara daring melalui aplikasi OSS Berbasis Resiko (OSS RBA).Sistem / Aplikasi OSS sebagai aplikasi pendukung pelaporan pelaksanaan penanaman modal terus update dalam Upaya memfasilitasi pelaku usaha .

Pada sasaran Meningkatnya Iklim Investasi terdapat satu indikator dengan realisasi yang disajikan pada tabel berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Iklim Investasi Tahun 2024

No	IKU	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra	%
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Iklim Investasi Ik: Presentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	-	26 %	35,77%	137,58%	31%	115,4

Dalam mencapai sasaran meningkatnya Nilai Investasi tentunya ada beberapa permasalahan / factor penghambat maupun factor pendukung antara lain

- Faktor Penghambat :
  1. Pelaku Usaha belum memiliki NIB
  2. Sebagian Pemilik NIP / Pelaku Usaha adalah Pelaku UMK yang tidak wajib untuk menyampaikan laporan LKPM
  3. Aplikasi OSS masih terus dalam proses maintenance
  4. Kurangnya Bimbingan Teknis terkait Pengisian LKPM bagi Pelaku Usaha
  5. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanamn Modal kurang memenuhi sasaran
- Faktor Pendukung :
  1. Sosialisasi Perizinan Berusaha
  2. Bintek / Pendampingan pengisian / penyusunan LKPM
  3. Koordinasi Inteksip dengan BKPM maupun instansi di Tingkat propinsi dan kabupaten Kota serta stake holder terkait dan pelaku usaha
  4. Optimalisasi pemanfaatan akses semua media social

Upaya / Strategi sebagai langkah kedepan untuk mencapai sasara meningkatnya investasi antara lain :

1. Menyusun Peta Potensi Investasi yang bermanfaat bagi pemerintah sebagai basis data untuk menetukan kebijakan perencanaan Tata ruang, menetukan kebijakan Pembangunan prasarana fisik dan bagi pelaku usaha bermanfaat sebagai bahan informasi peluang investasi , Lokasi investasi, sebaran potensi sumber daya dan potensi investasi
2. Menyusun strategi kegiatan Promosi Penanaman Modal yang lebih mengarah tujuan peningkatan investasi
3. Melaksanakan pengawasan yang lebih intensif bagi PMDN dan PMA serta UMK
4. Menfasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah atau peraturan Kepala Daerah terkain Insentif dan Kemudahan Perizinan Berusaha di Daerah
5. Melaksanakan Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Kabupaten
6. Membangun Paradigma Investasi barbasis Lahan menjadi Investasi berbasis Tata Ruang melalui Upaya mengoptimalkan ruang yang tersedia tanpa melanggar RTRW atau RDTR

B. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk sebagai institusi layanan publik yang strategis bagi para pelaku usaha terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, DPMPTSP diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif. Para pelaku usaha, investor dan calon investor mengurus izin usaha secara online tanpa dibatasi waktu dan tempat, disamping juga memangkas birokrasi panjang dan memakan waktu yang semula cukup lama. Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi,sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Nganjuk terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut penyelenggaraan pelayanan yang dikelola oleh DPMPTSP tahun 2024 melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Portal dpmptspnganjukkab.go.id.

Layanan melalui Sistem OSS dan Aplikasi SIPENTOL pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang disajikan dalam diagram batang dibawah ini:



Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu terdapat satu indikator dengan realisasi yang disajikan pada tabel berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Tahun 2024

No	IKU	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra	%
			Target	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ik: Indeks Pelayanan Publik	88 (Baik)	3.6	4,65	129.17	4,1	113.41

Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan , yaitu Indek Pelayanan Publik pada Renstra 2024 – 2026 berbeda dengan Renstra 2018 – 2023 , pada Renstra 2018 – 2023 Sasaran Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Indikator Kinerja Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh dari SUKMA E Jatim sehingga dapat diperoleh data nilai IKM setiap bulan sedangkan pada Renstra 2024 – 2026 DPMPTSP Kabupaten Nganjuk mengambil Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan indikator Sasaran Indek Pelayanan Publik (IPP), IPP adalah alat ukur untuk menilai kualitas pelayanan punlik yang diberikan oleh pemerintah, IPP digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat pusat dan daerah sesuai PerMenPANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, PEKPPP diselenggarakan oleh Kementerian PANRB atau Organisasi penyelenggara dapat melakukan PEKPPP Mandiri sacara Internal

Pada tahun 2024 DPMPTSP tidak menjadi bagian penilaian PEKPPP oleh Kementerian PANRB sehingga DPMPTSP mengkonversi Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 menjadi indek Pelayanan Publik dengan skala mengikuti Indek Pelayanan Publik. skala pada IPP adalah 0 – 5 sedangkan pada IKM 0 – 100

Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan , yaitu Indek Pelayanan Publik dapat melampaui target Indikator Indek Pelayanan

Publik Sektor Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 dengan target 3,6 terealisasi 4,65 dengan capaian 129.17% dan kategori Sangat Baik. Tahun 2024 DPMPTSP berhasil memperoleh Nilai IKM sebesar 93,39. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan kepuasan masyarakat dengan pelayanan yang diterima di DPMPTSP pada tahun 2025

Dalam upaya mencapai sasaran meningkatnya Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tentunya ada beberapa permasalahan/factor penghambat maupun faktor pendukung, antaralain:

- Faktor penghambat untuk mencapai sasaran meningkatnya Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi:
  1. Adanya dinamika regulasi pusat yang harus segera diikuti regulasi daerah;
  2. Keterlambatan penyesuaian regulasi;
  3. Sering terjadi perubahan aturan tentang pelayanan perizinan Berusaha melalui OSS (trial and error);
  4. Persyaratan perizinan terkait Izin Berusaha melalui OSS kurang mapan;
  5. Belum adanya kesepahaman tentang MPP;
  6. Kesepahaman terhadap Standar Pelayanan dan SOP belum memadai antar stakeholder penyelenggara pelayanan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha terintegrasi;
  7. Penerbitan izin tidak tepat waktu karena kendala yang harus sering dikomunikasikan;
  8. Terjadinya gangguan sistem aplikasi perizinan daerah;
  9. Fungsi peralatan dan perlengkapan kantor tidak maksimal;
  10. Terjadinya hang dan serangan hacker pada Sistem OSS;

- Faktor pendukung untuk mencapai sasaran meningkatnya Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi:
  1. Koordinasi intensif dengan kementerian/Lembaga dan OPD terkait;
  2. Sinkronisasi aturan;
  3. Membuat kebijakan dan sistem pendukung agar pelayanan tetap berjalan dengan baik;
  4. Menggabungkan NSPK lama dan baru sambil menunggu sinkronisasi regulasi;

5. Disosialisasikannya terus menerus tentang komitmen Mal Pelayanan Publik/MPP;
6. Pembahasan secara komprehensif terhadap Standar Pelayanan dan SOP
7. Penyelenggaraan in-house training dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM secara konsisten :
8. Tim bidang IT yang berkoordinasi secara intensif dalam memperbaiki kendala sistem aplikasi yang ada.
9. Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan secara bertahap dan berkelanjutan.
10. Upaya Inovasi dalam penyelenggaraan tupoksi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh semua stakeholder terkait

3.1.6. Analis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.6
Efisieansi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya iklim investasi	Presentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	137,58	95,15	42.45
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indek Pelayanan Publik (IPP)	129.17	96,3	32.87

Berdasarkan Tabel 3.1.6 dapat disimpulkan capaian kinerja sasaran DPMPTSP Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dapat dicapai dengan menggunakan anggaran sebesar 95.15 % dari pagu Rp 10.807.937.376 Sehingga, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target sasaran meningkatnya iklim investasi sebesar 42.45 % dan capaian tingkat efisiensi pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan sebesar 32.87%.

Artinya, DPMPTSP Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan perencanaan kinerja dan anggaran dengan baik, karena anggaran yang dimiliki mampu dimaksimalkan untuk pencapaian kinerja dengan kategori Sangat Baik dimana anggaran yang tidak terserap terbanyak di Belanja Gaji Pegawai

3.1.7 Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian pernyataan kinerja disajikan dalam tabel berikut

Tabel 3.1.7

Analisis Program / Kegiatan Penunjang keberhasilan / kegagalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya iklim investasi	Presentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase Dokumen potensi Investasi yang tersusun	100 %
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Prosentase Dokumen Potensi Investasi Yang Tersusun	100 %
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Kegiatan Promosi Penanaman Modal	100 %
			Penyelenggaraan Promosi Penanam An Modal Yang Menjadi Kewenang An Daerah Kabupa-Ten /Kota	Prosentase Kegiatan Promosi Penanaman Modal	100 %
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal Yang Dilaksanakan	100 %
			Pengendalian Pelaksanaan	Prosentasi Kegiatan	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
			Pena-Nanman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Pengendalian Penanaman Modal Yang Dilaksanakan	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indek Pelayanan Publik (IPP)	Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Kegiatan Usaha yang mendapat pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal	100 %
			Pelayanan Perijinan Dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Kegiatan usaha yang mendapat pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal	3800 Pelaku Usaha
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Prosentase data dan informasi perizinan yang dimanfaatkan	100%
			Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kab/Kota	20 Dok
			Program Penunjang Urusan	Nilai Sakip Dinas Penanaman	Nilai 72,90

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
			Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Modal Dan Pelayanan Teadu Satu Pintu	
			Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dok
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10 Dok
			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersediannya Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Lap
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25 Dok
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitas Dan Koordinasi Bagian Umum Yang Dilaksanakan	100 Paket
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disediakan	40 Unit
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Lap

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Terpelihara	33 Unit

Pada Tabel 3.1.7 terlihat bahwa capaian indikator kinerja Program dan Kegiatan seluruhnya telah mencapai target dan sangat menunjang dalam rangka pencapaian indikator tujuan dan sasaran kinerja DPMPTSP Kabupaten Nganjuk di tahun 2024

Capaian kinerja program tersebut tidak lepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan. Di tahun 2024 ini semua program dan kegiatan telah dapat dilaksanakan secara lancar dan maksimal, baik secara fisik yang mencapai 100%

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP di Tahun 2024 mengalami beberapa kali Perubahan ,

No		Anggaran
1	APBD	8.204.174.450
2	P APBD I	8.406.190.450
3	P APBD II	8.706.190.450
4	P APBD III	10.807.937.376

Realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2024

	Program / Keg / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**9.698.976.376**	**8.983.709.532**	**715.266.844**	**92,63**
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	**25,325,000**	**9,834,500**	**15,490,500**	**38.83**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	5.065.000	780.000	4.285.000	15,40 %
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja perangkat daerah	5.065.000	4.099.500	965.500	80,94 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.195.000	4.955.000	3.885.900	32,61
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**2,944,122,000**	**2,689,501,424**	**254,620,576**	**91.35**
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2,924,210,000	2,682,357,424	241,852,576	91.73
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	9,956,000	906,000	9,050,000	9.10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	9,956,000	6,238,000	3,718,000	62.66
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**6,078,000**	**4,004,000**	**2,074,000**	**65.88**
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah pada SKPD	6,078,000	4,004,000	2,074,000	65.88
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**150,000,000**	**150,000,000**	-	**100.00**
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150,000,000	150,000,000	-	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**930,890,776**	**828,950,587**	**101,940,189**	**89.05**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	39,847,500	37,445,600	2,401,900	93.97

	Program / Keg / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144,102,876	133,162,550	10,940,326	92.41
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	86,685,400	77,103,800	9,581,600	88.95
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	10,200,000	10,200,000	-	100.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,960,000	15,560,000	400,000	97.49
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600,220,000	522,103,637	78,116,363	86.99
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33,875,000	33,375,000	500,000	98.52
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	**1,065,334,400**	**1,032,580,900**	**32,753,500**	**96.93**
	Pengadaan Mebel	173,230,000	166,214,000	7,016,000	95.95
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	476,718,200	456,200,000	20,518,200	95.70
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	237,386,200	236,760,000	626,200	99.74
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bagunan Lainnya	178,000,000	173,406,900	4,593,100	97.42
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**1,182,196,000**	**1,006,072,399**	**176,123,601**	**85.10**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	3,654,000	1,346,000	73.08
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	231,600,000	193,804,369	37,795,631	83.68
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	945,596,000	808,614,030	136,981,970	85.51
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**3,395,030,200**	**3,262,765,722**	**132,264,478**	**96.10**
	Penyediaan JasaPemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan	211,265,600	158,216,167	53,049,433	74.89

	Program / Keg / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Pemeliharaan Mebel	8,000,000	8,000,000	-	100.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125,160,000	114,047,980	11,112,020	91.12
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	300,000,000	299,034,000	966,000	99.68
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung dan Bangunan Kantor	2,750,604,600	2,683,467,575	67,137,025	97.56
2	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**599,950,000**	**558,899,000**	**41,051,000**	**93.16**
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**599,950,000**	**558,899,000**	**41,051,000**	**93.16**
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	344,800,000	317,034,000	27,766,000	91.95
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten /Kota	75,000,000	74,925,000	75,000	99.90
3	**Program Promosi PM**	**180,150,000**	**166,940,000**	**13,210,000**	**92.67**
	Penyelenggaraan Promosi PM yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	**180,150,000**	**166,940,000**	**13,210,000**	**92.67**
	Pelaksanaan kegiatan promosi PM kabupaten Kota	180,150,000	166,940,000	13,210,000	92.67
4	**Program Pelayanan PM**	**209,375,000**	**171,566,500**	**37,808,500**	**81.94**
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**209,375,000**	**171,566,500**	**37,808,500**	**81.94**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	24,300,000	12,535,000	11,765,000	51.58
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha	119,150,000	99,181,500	19,968,500	83.24

	Program / Keg / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
	Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik				
	Penyediaan dan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	18,000,000	15,075,000	2,925,000	83.75
	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	47,925,000	44,775,000	3,150,000	93.43
5	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**267,016,000**	**191,541,460**	**75,474,540**	**71.73**
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**267,016,000**	**191,541,460**	**75,474,540**	**71.73**
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	60,302,000	23,895,000	36,407,000	39.63
	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	141,109,000	114,926,460	26,182,540	81.45
	Pengawasan Penanaman Modal	65,605,000	52,720,000	12,885,000	80.36
6	**Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**32,620,000**	**28,734,100**	**3,885,900**	**88.09**
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**32,620,000**	**28,734,100**	**3,885,900**	**88.09**
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik	32,620,000	28,734,100	3,885,900	88.09

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa realisasi anggaran kegiatan untuk sasaran strategis meningkatnya nilai investasi daerah untuk Indikator Kinerja nilai investasi Daerah realisai kinerja mencapai 100 % dan Realisasi Anggaran rata rata mencapai 95,15 % , sedangkan sasaran strategis Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan indicator kinerja Indek Kepuasan Masyarakat realisasi kinerja mencapai 100 % dan realisasi Anggaran mencapai 96,34 Realisasi anggaran tidak dapat mencapai 100 % dikarenakan belanja Gaji tidak dapat terserap seluruhnya dan anggaran yang bersumber dari DAK yang regulasinya baru diterima pada Tribulan II

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja sesuai dengan indikator kinerja masing-masing kegiatan.

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terpadu Kabupaten Nganjuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama " Nilai Investasi Daerah " tercapai Rp 1.359.191.202.844 dari target sebesar 1.050.000.000.000 atau hanya tercapai 129,45%
2. Indikator Kinerja Utama " Indeks Pelayanan Publik " tercapai 4,66 dari target 4,1 atau terealisasi sebesar 100,7 %

Berdasarkan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Tahun 2024 ini, diharapkan kinerja tersebut tetap dapat dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang. Untuk sasaran nilai investasi sudah melampauai target hendaknya tetap dipertahankan dan dapat ditingkatkan kembali seiring dengan iklim investasi di Kabupaten Nganjuk yang semakin kondusif

Sasaran IPP yang sudah melampaui target hendaknya tetap dipertahankan dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan.

Dari kedua sasaran tersebut terdapat beberapa permasalahan dan diberikan solusi sebagai berikut.

A. Permasalahan
    1. Belum adanya regulasi tentang kemudahan berinvestasi / Perda Percepatan Perizinan Berusaha
    2. Masih adanya perusahaan yang belum menyampaikan LKPM.
    3. Masih adanya perusahaan yang tidak/belum merealisasikan kegiatannya di lapangan setelah mereka memiliki Nomor Induk Berusahan (NIB)
    4. Masih kurangnya pengetahuan pihak perusahaan dalam pengisian Laporan LKPM
    5. Kapasitas SDM masih perlu ditingkatkan sesuai perkembangan teknologi

B. Solusi :

1. Melaksanakan Promosi Penanaman Modal dengan berbasis Data Invesment Project Ready to Offer
2. Menyusun Peraturan Daerah Percepatan Perizinan Berusaha di Daerah
3. Melakukan Bimbingan Teknis kepada Pelaku usaha untuk merealisasikan rencana kegiatan usahanya yang telah didaftarkan di OSS
4. Melakukan Pembinaan, pemantauan dan Pengawasan Penanaman modal agar pelaku usaha tertib untuk melakukan pelaporan Kegiatan penanaman Modalnya
5. Peningkatan kompetensi seluruh Pegawai ASN dan Non ASN di Lingkungan DPMPTSP
6. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana dan pendukung Gedung mal Pelayanan Publik
7. Ketersediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait layanan perizinan dan non perizinan pada beberapa media baik online maupun offline (website, media sosial, brosur, baliho, sosialisasi dll)

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Nganjuk ini, masih banyak kekurangannya, saran kritik yang membangun diperlukan untuk mencapai hasil sesuai tujuan, kelemahan dalam penyajian data- data yang mendukung uraian dan analisa kedepannya akan menjadi hal yang mendasar dalam perbaikan penyajian laporan ini.

Akhirnya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Nganjuk tahun 2024 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

LAMPIRAN BUKTI DUKUNG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

Tahun 2024

DPMPTSP

Kabupaten Nganjuk

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk
MPP Nyawiji Kab. Nganjuk Jalan Brantas Kelurahan Werungotok
Telp/Fax/ (0358) 3510097 Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id Website : dpmptsp.nganjukkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PURWO BUJONO, S.Hut

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SRI HANDOKO TARUNA, S.STP, M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Nganjuk

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalan rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk , 03 Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI NGANJUK

SRI HANDOKO TARUNA, S.STP, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN NGANJUK

PURWO BUJONO, S.Hut
Pembina Tk I
NIP. 19670912 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Iklim Investasi	Presentase Pertumbuhan Nilai Investasi	26 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,6 (Baik)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 7.328.149.450,-	APBD
2. Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 431.500.000,-	APBD
3. Promosi Penanaman Modal	Rp. 180.150.000,-	APBD
4. Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 224.075.000,-	APBD
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 217.016.000,-	APBD dan DAK
6. Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 25.300.000,-	APBD
Jumlah	**Rp. 8.406.190.450,-**	

Nganjuk, 03 Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI NGANJUK

SRI HANDOKO BARUNA, S.STP, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN NGANJUK

PURWO BUJONO, S.Hut
Pembina Tk I
NIP. 19670912 199703 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MPP NYAWIJI Jalan Brantas Kelurahan Werungotok

Telp/Fax/ (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 188 / 08 / K / 411.308 / 2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP NGANJUK TAHUN 2024 – 2026

KEPALA DPMPTSP DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modan dan PTSP Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Kabupaten Nganjuk

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peaturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan rencana Keja Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor ..... Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 -2023
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

Memutuskan : KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan , menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 15 - 01 - 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

PURWO BUJONO, S.Hut.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670912 199703 1 004

Lampiran : Keputusan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Daerah Kabupaten Nganjuk Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Daerah Kabupaten Nganjuk

Nomor : 188 / 08 / K / 411.308 / 2024

Tanggal : 15 - 01 - 2024

FORMAT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKI)
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024-2026

1. PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2. JABATAN : KEPALA DINAS
3. TUGAS : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
4. FUNGSI : a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
   b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
   d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

SASARAN		FORMULA IDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE (RP)			PENJELASAN	SUMBER DATA	PROGRAM PEMBANGUNAN	PENANGGUNG JAWAB
Uraian	Indikator Kinerja		2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Meningkatnya Iklim Investasi	Nilai Investasi	Nilai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	1.050.000.000.000	1.365.000.000.000	1.774.500.000.000	a). Konsep : Realisasi Investasi PMDN dan PMA	1. PERKA BKPM NO 5 TAHUN 2021	1. Program Pengembangan Iklim	DPMPTSP Kabupaten Nganjuk
						b). Definisi Operasional :			

SASARAN		FORMULA IDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE (RP)			PENJELASAN	SUMBER DATA	PROGRAM PEMBANGUNAN	PENANGGUNG JAWAB
Uraian	Indikator Kinerja		2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Menghitung Nilai Investasi Yang Masuk pada Tahun N dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang sudah melaporkan Kegiatan Penanaman Modalnya	2. Substansi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
						c). Formulasi Perhitungan : Nilai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)			
						d) Manfaat Untuk mengetahui peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten Nganjuk pada tahun berjalan dan pengambilan Langkah perbaikan untuk tahun kedepannya			
						e). Cara Pengumpulan Data : compilasi produk administrasi (Compromin) Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal pada OSS RBA Tahun (N)			

SASARAN		FORMULA IDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE (RP)			PENJELASAN	SUMBER DATA	PROGRAM PEMBANGUNAN	PENANGGUNG JAWAB
Uraian	Indikator Kinerja		2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						f). Frekuensi waktu pengumpulan data : 1 Tahun / sepanjang tahun			
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dikonversi = Nilai Indeks X Nilai Dasar	88	89	90	a). Konsep : Indeks Kepuasan Masyarakat yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan public dilingkungan DPMPTSP	1. PERMENPA NRB NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA UNIT PENYELENG GARA PELAYANA N PUBLIK 2. Substansi Pelayanan, Pengelolaan Data dan SIPM	1. Program Pelayanan Penanaman Modal 2. Program Pengolahan Data dadn Sistem Informasi Penanaman Modal	
						b). Definisi Operasional : Menghitung nilai dari indeks berdasarkan 9 Aspek sebagai beriiku : 1. Persyaratan Pelayanan 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana.			

SASARAN		FORMULA IDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE (RP)			PENJELASAN	SUMBER DATA	PROGRAM PEMBANGUNAN	PENANGGUNG JAWAB
Uraian	Indikator Kinerja		2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						c). Formulasi Perhitungan : Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dikonversi = Nilai Indeks X Nilai Dasar Dimana survei dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian masyrakat atas pelayanan yang diberikan dan dihitung dalam setiap tribulan / sepanjang tahun			
						d) Manfaat Untuk mengukur Penilaian Pelayanan Publik Tahun berjalan dan peningkatan pelayanan pada tahun berikutnya			
						e). Cara Pengumpulan Data : Compilasi Produk Administrasi (Compromi) Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat			
						f). Frekuensi waktu pengumpulan data : 1 Tahun (sepanjang tahun)			

KABUPATEN NGANJUK

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : PURWO BUJONO, S.Hut
b. NIP : 196709121997031004
c. Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Nganjuk sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
NIP. 196612271986021001

Nganjuk, Tanggal 02 Januari 2024
Disahkan oleh,
PPKD

KARTIMAH, SE,MSi
NIP. 196405051987032012

KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
ORGANISASI	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Nama : PURWO BUJONO, S.Hut
b. NIP : 196709121997031004
c. Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

KARTIMAH, SE,MSi
NIP: 196405051987032012

Nganjuk, Tanggal 02 Januari 2024
Pengguna Anggaran

PURWO BUJONO, S.Hut
NIP: 196709121997031004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KAB. NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

DPA REKAPITULASI SKPD

Nomor : DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
			Jumlah Pendapatan	**Rp0**
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp7.428.552.050**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp3.605.400.000
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.823.152.050
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp775.622.400**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp775.622.400
			Jumlah Belanja	**Rp8.204.174.450**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp8.204.174.450)**
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0**
			Pembiayaan Neto	**Rp0**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0	Januari	Rp796.203.626
Februari	Rp0	Februari	Rp1.704.376.196
Maret	Rp0	Maret	Rp591.293.746
April	Rp0	April	Rp743.208.746
Mei	Rp0	Mei	Rp895.230.996
Juni	Rp0	Juni	Rp953.666.246
Juli	Rp0	Juli	Rp537.616.230
Agustus	Rp0	Agustus	Rp624.979.980
September	Rp0	September	Rp586.547.130
Oktober	Rp0	Oktober	Rp220.353.579
November	Rp0	November	Rp232.406.824
Desember	Rp0	Desember	Rp318.291.151
Jumlah	**Rp0**	**Jumlah**	**Rp8.204.174.450**

Nganjuk, Tanggal 02 Januari 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PURWO BUJONO, S.Hut
NIP. 196709121987031004

Mengesahkan,
PPKD

KARTIMAH, SE,MSi
NIP. 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

KABUPATEN NGANJUK

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan pergeseran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : PURWO BUJONO, S.Hut
b. NIP : 196709121997031004
c. Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Nganjuk sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
NIP: 196612271986021001

Nganjuk, Tanggal 22 Maret 2024
Disahkan oleh,
PPKD

KARTIMAH, SE,MSi
NIP: 196405051987032012

KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
ORGANISASI	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Nama : PURWO BUJONO, S.Hut
b. NIP : 196709121997031004
c. Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Belanja SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

KARTIMAH, SE,MSi
NIP: 196405051987032012

Nganjuk, Tanggal 22 Maret 2024
Pengguna Anggaran

PURWO BUJONO, S.Hut
NIP: 196709121997031004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	DPPA REKAPITULASI SKPD
PEMERINTAH KAB. NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024	
Nomor : DPPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2024	
Organisas: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu i	

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah Berkurang (Rp)
				Sebelum	Setelah	
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp7.428.552.050**	**Rp7.630.568.050**	**Rp202.016.000**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp3.605.400.000	Rp3.635.041.400	Rp29.641.400
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.823.152.050	Rp3.995.526.650	Rp172.374.600
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp775.622.400**	**Rp775.622.400**	**Rp0**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp775.622.400	Rp775.622.400	Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0	Januari	Rp805.953.626
Februari	Rp0	Februari	Rp1.747.059.671
Maret	Rp0	Maret	Rp593.762.100
April	Rp0	April	Rp849.616.969
Mei	Rp0	Mei	Rp922.857.350
Juni	Rp0	Juni	Rp963.408.350
Juli	Rp0	Juli	Rp656.085.300
Agustus	Rp0	Agustus	Rp615.177.084
September	Rp0	September	Rp476.409.634
Oktober	Rp0	Oktober	Rp220.225.683
November	Rp0	November	Rp234.875.178
Desember	Rp0	Desember	Rp320.759.505
Jumlah	**Rp0**	**Jumlah**	**Rp8.406.190.450**

Nganjuk, Tanggal 22 Maret 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PURWO BUDIONO, S.Hut
NIP. 196709121997031004

Mengesahkan,
PPKD

KARTIMAH, SE,MSi
NIP. 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

KABUPATEN NGANJUK

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan pergeseran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : PURWO BUJONO, S.Hut
b. NIP : 196709121997031004
c. Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Nganjuk sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
NIP: 196612271986021001

Nganjuk, Tanggal 27 Mei 2024
Disahkan oleh,
PPKD

KARTIMAH, SE,MSi
NIP: 196405051987032012

KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
ORGANISASI	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Nama : PURWO BUJONO, S.Hut
b. NIP : 196709121997031004
c. Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Belanja SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

KARTIMAH, SE,MSi
NIP. 196405051987032012

Nganjuk, Tanggal 27 Mei 2024
Pengguna Anggaran

PURWO BUJONO, S.Hut
NIP. 196709121997031004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KAB. NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

DPPA
REKAPITULASI
SKPD

Nomor : DPPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah Berkurang (Rp)
				Sebelum	Setelah	
5	1		BELANJA OPERASI	Rp7.428.562.050	Rp7.930.568.050	Rp502.016.000
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp3.605.400.000	Rp3.635.041.400	Rp29.641.400
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.823.162.050	Rp4.295.526.650	Rp472.374.600
5	2		BELANJA MODAL	Rp775.622.400	Rp775.622.400	Rp0
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp775.622.400	Rp775.622.400	Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0	Januari	Rp805.957.826
Februari	Rp0	Februari	Rp1.747.059.671
Maret	Rp0	Maret	Rp593.762.100
April	Rp0	April	Rp849.616.969
Mei	Rp0	Mei	Rp922.857.350
Juni	Rp0	Juni	Rp1.457.139.550
Juli	Rp0	Juli	Rp656.085.300
Agustus	Rp0	Agustus	Rp525.177.084
September	Rp0	September	Rp476.409.634
Oktober	Rp0	Oktober	Rp220.225.683
November	Rp0	November	Rp234.875.178
Desember	Rp0	Desember	Rp217.028.305
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp8.706.190.450

Nganjuk, Tanggal 27 Mei 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PURWO SUJUNO, S.Hut
NIP.196709121997031004

Mengesahkan,
PPKD

KARTIMAH, SE, MSi
NIP. 196405051987032012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196512271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

KABUPATEN NGANJUK

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : PURWO BUJONO, S.Hut
b. NIP : 196709121997031004
c. Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Nganjuk sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPPA SKPD
Perubahan DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
NIP: 196612271986021001

Nganjuk, Tanggal 04 September 2024
Disahkan oleh,
PPKD

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
NIP: 196805111992022001

KABUPATEN NGANJUK

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	: 2 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	: 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
ORGANISASI	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Nama	: PURWO BUJONO, S.Hut
b. NIP	: 196709121997031004
c. Jabatan	: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
NIP: 196805111992022001

Nganjuk, Tanggal 04 September 2024
Pengguna Anggaran

PURWO BUJONO, S.Hut
NIP: 196709121997031004

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KAB. NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024

Perubahan DPA-SKPD

Nomor :

Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)	
						(Rp)	(%)
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp7.428.552.050,00**	**Rp9.852.602.976,00**	**Rp2.424.050.926,00**	**24.60**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp3.605.400.000,00	Rp2.984.791.485,00	(Rp620.608.515,00)	(20.79)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.823.152.050,00	Rp6.867.811.491,00	Rp3.044.659.441,00	44.33
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp775.622.400,00**	**Rp955.334.400,00**	**Rp179.712.000,00**	**18.81**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp775.622.400,00	Rp955.334.400,00	Rp179.712.000,00	18.81

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp799.136.276,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp1.737.079.720,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp586.762.403,00
April	Rp0,00	April	Rp824.508.020,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp882.351.207,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp1.410.920.288,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp573.186.664,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp322.132.864,00
September	Rp0,00	September	Rp826.226.656,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp2.721.651.323,00
November	Rp0,00	November	Rp79.620.737,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp44.361.218,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp10.807.937.376,00**

Nganjuk, Tanggal 04 September 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PURWO BUJONO, S.Hut
NIP. 196709121997031004

Mengesahkan,
PPKD

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
NIP. 196805111992022001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	PURWO BUJONO, S. Hut	196709121997031004	Wakil Ketua	
3.	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M. Si	196805111992022001	Sekretaris	